



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Telp. / Fax (0756) 22143
PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ 10 /Kpts/DKPS-PS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DI UNIT KERJA LAPANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik dan untuk mencapai target capaian kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan di Unit Kerja Lapangan Dinas Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan di Unit Kerja Lapangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:


- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan di Unit Kerja Lapangan Dinas Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan di Unit Kerja Lapangan Dinas Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang pelayanan dokumen kependudukan sesuai dengan yang telah diamanatkan,
 2. Melakukan dan mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam berkoordinasi dengan stake holder di wilayah kerja masing-masing dalam hal pemenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat,
 3. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk setiap permasalahan dalam pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan,
 4. Membuat laporan pelayanan Dokumen Kependudukan yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan secara berkala.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**



~~_____~~

EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ 10 /Kpts/DKPS-PS/2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI UNIT
KERJA LAPANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	EDI SISWADI, SE, MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	CIPTO, SE	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	KOORDINATOR
4.	SRI YANTINI, SH	KEPALA UKL KOTO XI TARUSAN	ANGGOTA
5.	KASRIL	KEPALA UKL IV NAGARI BAYANG UTARA	ANGGOTA
6.	ZULKAMBRI	KEPALA UKL BAYANG	ANGGOTA
7.	SYAFRUL SY, SH	KEPALA UKL IV JURAI	ANGGOTA
8.	JAMURIS	KEPALA UKL BATANG KAPAS	ANGGOTA
9.	INGRILA, S.Sos	KEPALA UKL LENGAYANG	ANGGOTA
10.	JUMRIANI	KEPALA UKL PANCUNG SOAL	ANGGOTA
11.	ZULHAMI, A.Md	KEPALA UKL BASA AMPEK BALAI TAPAN	ANGGOTA
12.	VENTRI DARMA YOGA	KEPALA UKL LUNANG	ANGGOTA
13.	PELKI ADI PUTRA	PENANGGUNG JAWAB UKL SUTERA	ANGGOTA
14.	JUDHA ERIX ANUGRAH	PENANGGUNG JAWAB UKL RANAH PESISIR	ANGGOTA
15.	IRVAN BASTEN ARWAN, S.Pd	PENANGGUNG JAWAB UKL LINGGO SARI BAGANTI	ANGGOTA
16.	HESTI INDRA YENI, S.Pd	PENANGGUNG JAWAB UKL AIRPURA	ANGGOTA
17.	AMELZA ABITA, S.Kom	PENANGGUNG JAWAB UKL RANAH AMPEK HULU TAPAN	ANGGOTA
18.	NATALIA, SE	PENANGGUNG JAWAB UKL SILAUT	ANGGOTA
19.	YESI MARYANI, SE	PETUGAS REGISTER UKL KOTO XI TARUSAN	ANGGOTA
20.	AKHIRA LAILATUL QADAR	PETUGAS REGISTER UKL KOTO XI TARUSAN	ANGGOTA
21.	NORFA ZIRAH, SE	PETUGAS OPERATOR UKL KOTO XI TARUSAN	ANGGOTA
22.	FRENGKY ANDIVO, SE	PETUGAS OPERATOR UKL KOTO XI TARUSAN	ANGGOTA
23.	AJI PANGESTU	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL KOTO XI TARUSAN	

24.	SELCIA YARNA SARI, S.Pd	PETUGAS REGISTER UKL BAYANG	ANGGOTA
25.	GAUNG ELANGGAR	PETUGAS OPERATOR UKL BAYANG	ANGGOTA
26.	HOLLI GAUS PUTRA	PETUGAS OPERATOR UKL BAYANG	ANGGOTA
27.	SANTI GUSRIANTI	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL BAYANG	ANGGOTA
28.	ELIA NOVITA	PETUGAS REGISTER UKL IV NAGARI BAYANG UTARA	ANGGOTA
29.	ASEP PEBRI ZOZEKA, A.Md	PETUGAS REGISTER UKL IV NAGARI BAYANG UTARA	ANGGOTA
30.	LIRA GUSWITA, S.Pd	PETUGAS OPERATOR UKL IV NAGARI BAYANG UTARA	ANGGOTA
31.	CHANDRA MARDIANSYAH	PETUGAS OPERATOR UKL IV NAGARI BAYANG UTARA	ANGGOTA
32.	GUSRIANTO	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL IV NAGARI BAYANG UTARA	ANGGOTA
33.	SRI RAHMADENI, A.Md	PETUGAS REGISTER UKL IV JURAI	ANGGOTA
34.	RINI NOFRITA	PETUGAS REGISTER UKL IV JURAI	ANGGOTA
35.	NOFI WALDI, S.Kom	PETUGAS OPERATOR UKL IV JURAI	ANGGOTA
36.	HEYAN OKTARINO	PETUGAS OPERATOR UKL IV JURAI	ANGGOTA
37.	DODI SUTRISNO	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL IV JURAI	ANGGOTA
38.	NOFTA DIANRA HARYAS	PETUGAS REGISTER UKL BATANG KAPAS	ANGGOTA
39.	YELVINA, A.Md	PETUGAS REGISTER UKL BATANG KAPAS	ANGGOTA
40.	YURLI HERAWATI	PETUGAS OPERATOR UKL BATANG KAPAS	ANGGOTA
41.	SASDI YABSA RUDSAN	PETUGAS OPERATOR UKL BATANG KAPAS	ANGGOTA
42.	JEFRINALDI	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL BATANG KAPAS	ANGGOTA
43.	DENDI PIRWANDI MARZA	PETUGAS REGISTER UKL SUTERA	ANGGOTA
44.	RAHMADONI WAHYUDI	PETUGAS REGISTER UKL SUTERA	ANGGOTA
45.	NORA WATI, SH	PETUGAS OPERATOR UKL SUTERA	ANGGOTA
46.	AFRIZAL	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL SUTERA	ANGGOTA
47.	NADIA SALSABILA, S.Sos	PETUGAS REGISTER UKL LENGAYANG	ANGGOTA
48.	ERLINA GUSTI	PETUGAS OPERATOR UKL LENGAYANG	ANGGOTA
49.	MAYA TIODORA, S.Kom	PETUGAS OPERATOR UKL LENGAYANG	ANGGOTA
50.	FERI FERNANDO	PETUGAS OPERATOR UKL LENGAYANG	ANGGOTA

51.	MULYADI	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL LENGAYANG	ANGGOTA
52.	RIA CAHAYA CITRA	PETUGAS REGISTER UKL RANAH PESISIR	ANGGOTA
53.	MONA GUSYULIA SARI, SE	PETUGAS REGISTER UKL RANAH PESISIR	ANGGOTA
54.	WAHYU MARDALENA	PETUGAS OPERATOR UKL RANAH PESISIR	ANGGOTA
55.	JONI PUTRA	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL RANAH PESISIR	ANGGOTA
56.	MIFTAHUL ATHIFAH	PETUGAS REGISTER UKL LINGGO SARI BAGANTI	ANGGOTA
57.	SUSILASANTI, S.Pd	PETUGAS REGISTER UKL LINGGO SARI BAGANTI	ANGGOTA
58.	FAUZIL HALIM, S.Kom	PETUGAS OPERATOR UKL LINGGO SARI BAGANTI	ANGGOTA
59.	ILKADRI	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL LINGGO SARI BAGANTI	ANGGOTA
60.	YANUZA TEGUH PRATAMA	PETUGAS REGISTER UKL AIRPURA	ANGGOTA
61.	AKVIR REFKI DARZA	PETUGAS REGISTER UKL AIRPURA	ANGGOTA
62.	ZULROMI HANDOKI	PETUGAS OPERATOR UKL AIRPURA	ANGGOTA
63.	IPNI HADI IRAWAN, SH	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL AIRPURA	ANGGOTA
64.	MISMAD RAISI DAHNI, SH	PETUGAS REGISTER UKL PANCUNG SOAL	ANGGOTA
65.	RAMA YANTI, S.Pd	PETUGAS REGISTER UKL PANCUNG SOAL	ANGGOTA
66.	RIZAL ADE PUTRA	PETUGAS OPERATOR UKL PANCUNG SOAL	ANGGOTA
67.	RIKA SRI WIRDA NINGSIH, SE	PETUGAS OPERATOR UKL PANCUNG SOAL	ANGGOTA
68.	TAUFIK INDRA JAYA	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL PANCUNG SOAL	ANGGOTA
69.	YESI NOFRITA, SE	PETUGAS REGISTER UKL BASA AMPEK BALAI TAPAN	ANGGOTA
70.	RESTI PERMATASARI, S.Pd	PETUGAS REGISTER UKL BASA AMPEK BALAI TAPAN	ANGGOTA
71.	RIKE RISTUTI, SM	PETUGAS OPERATOR UKL BASA AMPEK BALAI TAPAN	ANGGOTA
72.	M. SANTONI, S.Sos	PETUGAS OPERATOR UKL BASA AMPEK BALAI TAPAN	ANGGOTA
73.	M. ARIYOGA DWI DALPENDRI	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL BASA AMPEK BALAI TAPAN	ANGGOTA

74.	WENY ANGRAINI	PETUGAS REGISTER UKL RANAH AMPEK HULU TAPAN	ANGGOTA
75.	RINDI PUTRA YANT, SM	PETUGAS REGISTER UKL RANAH AMPEK HULU TAPAN	ANGGOTA
76.	GUSWANDI	PETUGAS OPERATOR UKL RANAH AMPEK HULU TAPAN	ANGGOTA
77.	KARTIKA PERMATA SARI	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL RANAH AMPEK HULU TAPAN	ANGGOTA
78.	TRI ENDANG DININGRUM, S.Pd	PETUGAS REGISTER UKL LUNANG	ANGGOTA
79.	SITI NURJAMI MEGAWATI, A.Md	PETUGAS REGISTER UKL LUNANG	ANGGOTA
80.	RINALDO, S.Pd	PETUGAS OPERATOR UKL LUNANG	ANGGOTA
81.	WAHYU ACHITA SEMPUL, S.Pt	PETUGAS OPERATOR UKL LUNANG	ANGGOTA
82.	KONI ROMANTIR	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL LUNANG	ANGGOTA
83.	JULIANTI, SIP	PETUGAS REGISTER UKL SILAUT	ANGGOTA
84.	AYU ADHIRA, S.St	PETUGAS REGISTER UKL SILAUT	ANGGOTA
85.	JONI ISKANDAR	PETUGAS KEBERSIHAN/ KEAMANAN KANTOR UKL SILAUT	ANGGOTA
86.	SUSMAWITA	OPERATOR AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	ANGGOTA
87.	SHILFIA EMBUN SYURI	OPERATOR PELAYANAN CETAK KTP ELEKTRONIK DAN KIA	ANGGOTA
88.	CHANTIKA IVONNE	OPERATOR PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK	ANGGOTA
89.	DENDI ISFANDRA	REGISTER PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
90.	NIKA GUSNITA	OPERATOR CETAK KARTU KELUARGA DAN PINDAH DATANG PENDUDUK	ANGGOTA
91.	ROZI SANJAYA PUTRA	OPERATOR ARSIP DIGITAL	ANGGOTA
92.	SYAFRIAL	TENAGA PENATA ARSIP DIGITAL	ANGGOTA
93.	RETNO SUCI WULANDARI	OPERATOR PELAYANAN KARTU KELUARGA PINDAH DATANG PENDUDUK	ANGGOTA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001